



**PENGARUH UMK, JUMLAH USAHA, INVESTASI, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR
INDUSTRI DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh
Bagas Frendy Nata
NIM 110810101148

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH UMK, JUMLAH USAHA, INVESTASI, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR
INDUSTRI DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Bagas Frendy Nata
NIM 110810101148

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagas Frendy Nata
NIM : 110810101148
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : **Pengaruh UMK, Jumlah Usaha, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Banyuwangi**

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah di ajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Maret 2015

Yang Menyatakan,

Bagas Frendy Nata

NIM. 110810101148

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : **Pengaruh UMK, Jumlah Usaha, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Banyuwangi**

Nama Mahasiswa : Bagas Frendy Nata

NIM : 110810101148

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 26 Maret 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sonny Sumarsono, MM.

NIP. 195804241988021001

Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

NIP. 196101221987022002

Mengetahui,
Ketua Jurusan IESP

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.

NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH UMK, JUMLAH USAHA, INVESTASI, DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR
INDUSTRI DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Bagas Frendy Nata

NIM : 110810101148

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal ;

17 April 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Drs. P. Edi Suswandi, MP (.....)
NIP. 195504251985031001
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindratin, M.Kes (.....)
NIP. 196411081989022001
3. Anggota : Aisah Jumiati, SE, MP (.....)
NIP. 196809261994032002
4. Pembimbing 1 : Drs. Sonny Sumarsono, MM (.....)
NIP. 195804241988021001
5. Pembimbing 2 : Dra. Nanik Istiyani, M.Si (.....)
NIP. 196101221987022002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP. 19630614199002001

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan langkah awal dari perjuanganku untuk mencapai semua mimpi-mimpiku dan menjadikan warna tersendiri bagi kehidupanku. Dengan rasa syukur kepada Sang Hyang Widhi Wasa, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku (Ibu Masiyem dan Bapak Sunardi) yang sangat luar biasa dan tak hentihentinya memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan selama ini.
2. Dosen-dosenku IESP yang telah memberikan cahaya pengetahuan dalam kehidupanku.
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember tercinta dan selalu kujunjung.

MOTTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menentukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

(Mario Teguh)

Setiap manusia sebenarnya mempunyai potensi dan dapat melakukan hal yang lebih banyak dan lebih baik dari yang ia duga.

(Edwin Louise Cole)

Berusalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.

(Penulis)

SKRIPSI

**PENGARUH UMK, JUMLAH USAHA, INVESTASI, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR
INDUSTRI DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

Oleh

BAGAS FRENDY NATA

NIM 110810101148

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Sonny Sumarsono MM.

Dosen Pembimbing II : Dra. Nanik Istiyani M.Si.

ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

**PENGARUH UMK, JUMLAH USAHA, INVESTASI, DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR
INDUSTRI DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Bagas Frendy Nata

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas
Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* terhadap pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori. Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 2004-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi dengan arah positif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan, “ada pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi” adalah diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa jika UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah, memiliki nilai positif, maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: UMK, Jumlah Usaha, Nilai Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Penyerapan Tenaga Kerja.

*EFFECT OF MINIMUM WAGE COUNTIES, THE NUMBER OF EFFORT,
INVESTMENT, AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON ABSORPTION OF
LABOR INDUSTRIAL SECTOR IN DISTRICT BANYUWANGI*

Bagas Frendy Nata

*Department of Economics and Development Study, the Faculty Economics,
Jember University*

ABSTRACT

This study was aimed to determine how much influence the independent variable on the dependent variable of the effect of minimum wage counties, the number of effort, investment, and government expenditure on absorption of labor in the industrial sector of Banyuwangi. This study uses explanatory. The data used or used in this research is secondary data such as time series data from 2004 to 2013 year period. The analytical method used is multiple linear regression analysis. Test results coefficient of multiple linear regression analysis showed that the minimum wage counties, the number of effort, investment, and government expenditure in simultaneous and partial spending significant effect on employment in Banyuwangi with positive direction. Based on these test results, it can be concluded that the hypothesis which states, "there is the influence of minimum wage counties, the number of effort, investment, and government expenditure on absorption of labor in Banyuwangi" is acceptable. This indicates that if the minimum wage counties, the number of effort, investment, and government expenditure, has a positive value, then it will have an impact in increasing absorption of labor in Banyuwangi.

Keywords: Minimum Wage Counties, The Number of Effort, Investment, Government Expenditure and Absorption of Labor.

RINGKASAN

Pengaruh UMK, Jumlah Usaha, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Banyuwangi; Bagas Frendy Nata, 110810101148; 2015; 82 Halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh UMK, Jumlah Usaha, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* terhadap pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 2004-2013. Variabel yang digunakan yaitu sebanyak 5 variabel. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Selanjutnya yang dilakukan menggunakan pendekatan yang bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan dengan adanya UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Banyuwangi, 2) UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya upah minimum kabupaten yang sesuai dengan kemampuan industri dan kebutuhan masyarakatnya akan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, 3) Jumlah usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah usaha yang ada didalam suatu wilayah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, 4)

Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya investasi yang ada didalam suatu wilayah akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri dan usaha, perkembangan yang ada akan memberikan daya dalam memberikan penyerapan tenaga kerja, 5) Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan dan memacu sektor ekonomi didaerahnya maka akan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

PRAKATA

Puja dan puji astuti dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asungkertha Waranugraha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh UMK, Jumlah Usaha, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Banyuwangi”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang tulus dan penghargaan yang tinggi, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Drs. Sonny sumarsono, M.M selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun penelitian.
2. Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Fathorrazi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes dan Ibu Dr. Lilis Yuliati, SE, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

7. Kedua Orangtuaku, Bapak Sunardi dan Ibu Masiyem tercinta, yang tidak kenal lelah sabar dan ikhlas mendidik, mendo'akan serta membimbingku hingga pada proses pencapaian saat ini.
8. Sahabat-sahabat dan teman-temanku IESP 2011 yang telah banyak membantuku dan memberiku pengalaman yang begitu berharga selama aku di Jember dan tidak pernah aku lupakan selamanya.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan, terima kasih banyak atas bantuan, persahabatan, dan kebersamaan serta kekeluargaan kita selama ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Lucas Anggi, Ayu Rizki, Tria Cill, Andryan Damara, Rury Lisiana, Ella Kusmawati, Dedy, Fahmi Rahmadani, Andi Setiawan, Praba Hadi, Fredi Arista, Setyawan Iqbal, Ragil Muhammad Aristo, Sofi Sobleng, Arika Kusuma, M Yuli Arifin, dan semua sahabatku tercinta yang tidak saya sebutkan terima kasih atas semua motifasi dan semangat yang kalian berikan selama ini.
11. Teman-temanku kos 59 yang selama ini menjadi penyemangat dan sahabat setia selama saya ada di Jember dan selalu kompak dalam menyelesaikan masalah satu sama lain.
12. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran demi kemajuan penulisan berikutnya sangat terbuka dan diharapkan bagi penulis. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa melimpahkan anugrah kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEMBIMBING	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja	8
2.1.2 Teori Upah Minimum	9

2.1.2.1 Fungsi Upah	11
2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi dalam Upah Minimum.....	12
2.1.2.3 Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	12
2.1.3 Teori Jumlah Unit Usaha	14
2.1.3.1 Hubungan Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	15
2.1.4 Teori Investasi.....	15
2.1.4.1 Jenis-jenis Investasi	17
2.1.4.2 Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	18
2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	21
2.1.5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual.....	30
2.4 Hipotesis Penelitian.....	32
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Unit Analisis	34
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3.1 Jenis Data.....	34
3.3.2 Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5 Metode Analisis Data.....	35
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.5.2 Analisis Deskriptif Statistik	38

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	38
3.5.4 Uji Hipotesis	39
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	43
4.1.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi	43
4.1.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Banyuwangi.....	45
4.1.1.3 Gambaran Umum Variabel Penelitian	47
4.1.2 Analisis Data.....	51
4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik	51
4.1.2.2 Analisis Deskriptif Statistik.....	56
4.1.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
4.1.2.4 Uji Hipotesis.....	59
4.1.2.4.1 Uji F.....	59
4.1.2.4.2 Uji t.....	59
4.1.2.4.3 Koefisien Determinasi	60
4.2 Pembahasan	61
4.2.1 Pengaruh UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	63
4.2.2 Pengaruh Jumlah Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	64
4.2.3 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	65
4.2.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	67
BAB V. PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

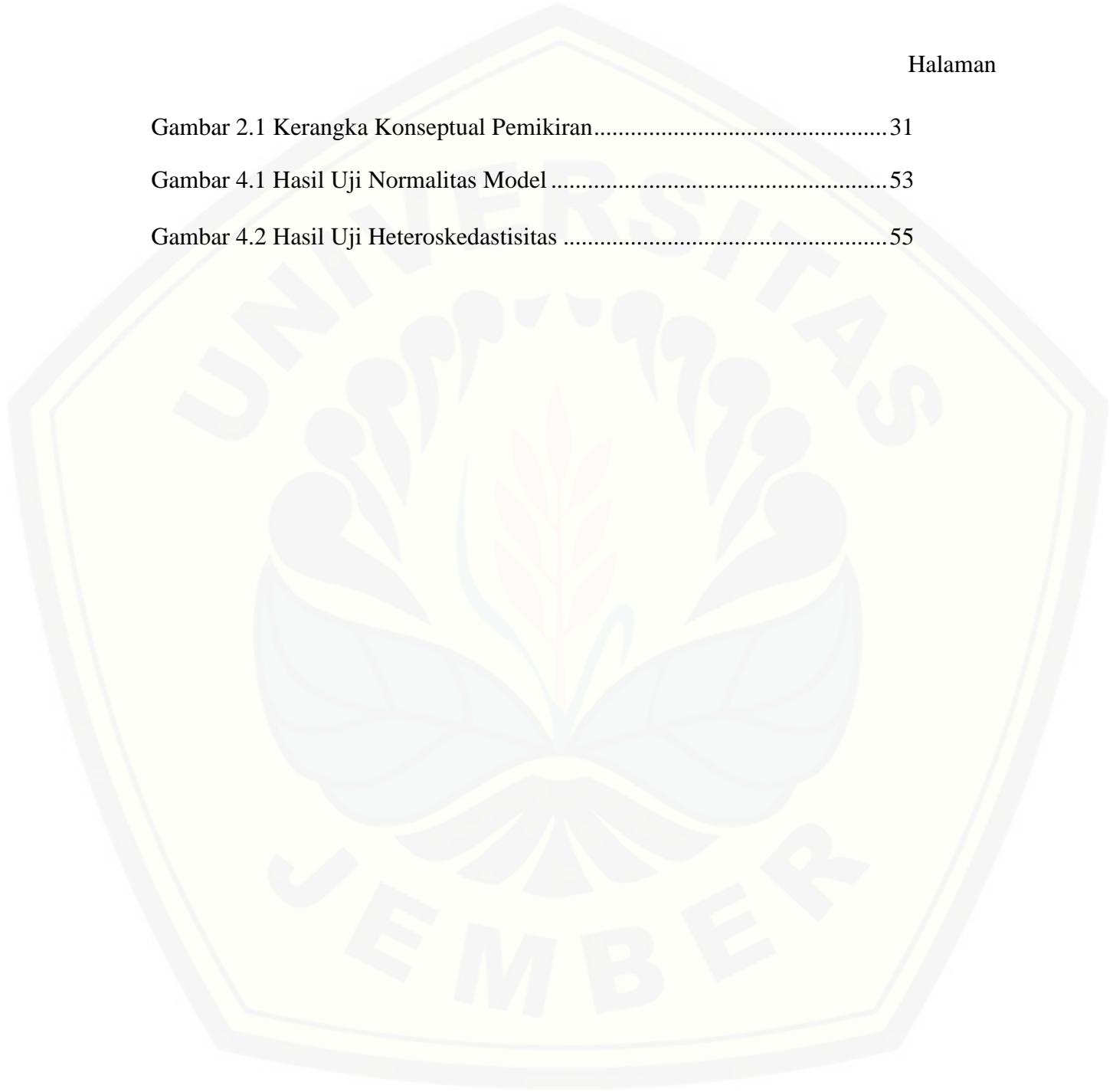


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Luas Kabupaten Banyuwangi	46
Tabel 4.2 Data Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kabupaten Banyuwangi	47
Tabel 4.3 Data UMK di Kabupaten Banyuwangi	48
Tabel 4.4 Data Jumlah Usaha sektor industri di Kabupaten Banyuwangi	49
Tabel 4.5 Data Investasi sektor industri di Kabupaten Banyuwangi	50
Tabel 4.6 Data Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Banyuwangi	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi	56
Tabel 4.10 Hasil Analisis Deskriptif Statistik	57
Tabel 4.11 Hasil Regresi Linear Berganda	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Model	53
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. REKAPITULASI DATA SEKUNDER PENELITIAN	74
LAMPIRAN 2. HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA	75
LAMPIRAN 3. TABEL F.....	81
LAMPIRAN 4. TABEL t.....	82

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas penyerapan tenaga kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Menurut Keynes dikatakan situasi makro suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Dalam satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Apabila seseorang menjalankan uangnya, ia akan membantu meningkatkan pendapatan di sektor ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia penyerapan tenaga kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dipihak lain.

Pembangunan ekonomi bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga keseimbangan harga dengan selalu memperhatikan tingkat inflasi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran perhatian yang cukup terhadap neraca perdagangan, pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata, tumbuhnya investasi-investasi dan mengatasi pengangguran. Apabila hal tersebut tidak segera di atasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Indonesia juga masih dihadapkan pada dilema kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh (pengangguran) sedangkan ketidakseimbangan eksternal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output nasional

hanya menunjukkan tingkat PDB yang meningkat tetapi tidak diikuti dengan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan upah.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah dan struktur perekonomian yang seimbang (Sadono Sukirno, 2003). Secara umum salah satu ciri kondisi negara berkembang adalah jumlah populasi cukup tinggi dengan konsekuensi angkatan kerja yang besar dan potensi pengangguran. Tidak jauh berbeda dengan negara berkembang lainnya, Indonesia juga memiliki kondisi sesuai ciri negara berkembang tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan aspirasi yang diamanatkan dalam UUD 1945, strategi dan kebijakan pembangunan sektor industri harus tetap dilakukan bersama dengan sektor-sektor dan bidang-bidang lain dalam ruang lingkup strategi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Dumairy, 1997). Sejalan dengan hal tersebut maka peran sektor industri semakin penting, sehingga sektor industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin atau *Leading Sektor*, peranan sektor industri dalam perekonomian suatu wilayah terlihat dalam kontribusi atau sumbangan sektor industri dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut (Dumairy, 1997).

Industrialisasi mulai digalakkan dari waktu ke waktu dengan salah satu tujuannya adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk. Pengertian industri sebenarnya sangatlah luas cakupannya yakni mulai dari pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Tujuan lain diharapkan dapat tercapai melalui pembangunan industri adalah Semakin luasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, penghematan devisa khususnya melalui pembangunan industri substitusi impor, peningkatan ekspor

serta semakin meningkatnya pembudidayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Dampak dari gejolak kritis perekonomian yang mengakibatkan kondisi masyarakat terutama kaum buruh semakin buruk. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi tingkat upah melalui kebijakan upah minimum. Sedangkan (Manning, 2002), menyatakan bahwa reformasi, pelaksanaan otonomi daerah, dan upah minimum regional (UMR) sudah menjadi isu penting dalam kebijakan sosial di Indonesia. Pada era reformasi ini, baik serikat buruh maupun organisasi non pemerintah (ORNOP) berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja yang menderita pada saat krisis ekonomi berlangsung. Hal ini belum dapat menyelesaikan persoalan. Hal tersebut dikarenakan para buruh menyatakan upah yang diterima di rasa belum layak untuk menopang kehidupannya, sehingga banyak para pekerja yang masih berharap agar upah minimum dapat ditingkatkan lagi.

Berdasarkan lampiran menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari tujuan utama dari setiap usaha mendapatkan *profit maximizing*. Menurut Ritonga (2005), secara logis upah minimum baru yang lebih tinggi mendorong pekerja senior meminta kenaikan upah. Oleh karena itu, pengusaha berharap kenaikan upah minimum seminimum mungkin. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat buruh lama menuntut upah yang lebih tinggi. Kondisi tersebut nantinya akan bermuara pada angka pengangguran yang semakin meningkat.

Otonomi Daerah diperlukan di Kabupaten Banyuwangi juga dituntut untuk mampu mengembangkan daerahnya. Untuk itu adanya koordinasi keselarasan

perencanaan pembangunan antar sektor juga harus mendapat perhatian umum, karena dengan adanya perubahan satu sektor akan mempengaruhi sektor yang lain. Todaro (2000), mengemukakan bahwa kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan adil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta. PDRB Kota Banyuwangi memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas.

Isu mengenai pertumbuhan ekonomi selalu menjadi sorotan, karena pada umumnya berbagai ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada tingkat pertumbuhan secara potensial dapat dicapainya (Mudjarat Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi pada masa ekonomi tradisional hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan PDB, baik secara keseluruhan maupun per kapita. Peningkatan PDB ini selanjutnya diharapkan akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan *trickle down effect* (Todaro, 2000). Namun demikian, pandangan yang berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi dalam membangun perekonomian suatu Negara mulai menuai banyak kritik dan mendapatkan masukan, sehingga memicu munculnya pandangan-pandangan baru dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tujuan inti sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi sebagai barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap ketergantungan.

Berdasarkan uraian diatas, GDP per kapita termasuk dalam salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Menurut Mankiw (2007), ada dua cara untuk melihat GDP yang dianggap sebagai ukuran terbaik yaitu melihat GDP sebagai pendapatan total dari setiap orang di perekonomian. Tentu ini berkaitan dengan pentingnya memastikan penduduk yang ada di suatu negara memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap. Yang kedua adalah melihat GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Ini berkaitan dengan investasi karena investasi sendiri merupakan pengeluaran atau pembelanjaan barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Dinamika penanaman modal atau investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi untuk membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Dumairy, 1997). Sementara upah, walaupun tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besar kecilnya jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan, yang selanjutnya juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini diambil perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi?
- 2) Seberapa besar pengaruh UMK secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi?
- 3) Seberapa besar pengaruh jumlah usaha secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi?
- 4) Seberapa besar pengaruh investasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi?
- 5) Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari studi ini adalah mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Secara rinci sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Untuk mengetahui pengaruh UMK secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi;
- 3) Untuk mengetahui pengaruh jumlah usaha secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi;
- 4) Untuk mengetahui pengaruh investasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi;

- 5) Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sarana pengembangan pengetahuan ilmiah dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya masalah penyerapan tenaga kerja.

- 2) Bagi Objek Yang Diteliti

Diharapkan studi penelitian ini dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembangunan sehingga dapat menambah penyerapan tenaga kerja.

- 3) Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau instansi lain yang menghadapi permasalahan yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Aris Anata (1993) dalam Zamrowi (2007) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2004-2013). Begitu pula dengan pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya berskala besar. Sebaliknya sektor informal merupakan sektor dengan kegiatan usaha umumnya sederhana, skala usaha relative kecil, umumnya sektor informal tidak berbadan hukum, usaha sektor informal sangat beragam. Dalam hal ini UKM merupakan salah satu indikasi dari sektor informal.

Proses dari usaha-usaha kesempatan kerja yang merupakan topik dalam penelitian ini dapat diwujudkan apabila pembinaan dan pembangunan industri kecil, sedang dan besar dapat berjalan dengan semestinya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat mendorong perekonomian rakyat. Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan cukup luas, menyerap tenaga kerja dalam maknanya menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha untuk dapat sesuai dengan usaha itu sendiri. Proses penyerapan tenaga kerja ini juga tidak terlepas dari kesempatan yang tersedia di tengah-tengah masyarakat. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli

tersebut diperoleh sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan balas jasa dari faktor-faktor produksi lainnya, pendapatan atas faktor produksi tersebut seluruhnya akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan.

Kaum klasik juga percaya dalam keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh. Dengan demikian dibawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Ketersediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak.

2.1.2 Teori Upah Minimum

Dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai penyebaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara penyebaran atas pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Di dalam teori ekonomi kedua jenis pembayaran pekerja tersebut dinamakan upah (Sukirno, 1999). Definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (30) adalah: *“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”*.

Menurut golongan keynesian baru, upah didalam pasaran ditentukan secara kontrak diantara pekerja dan majikan atau pihak perusahaan, dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan perkataan lain, upah cenderung untuk bertahan pada tingkat yang sudah disetujui oleh perjanjian diantara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan.

Pengurangan permintaan tenaga kerja tidak akan menurunkan upah nominal dan sebaliknya penambahan permintaan tenaga kerja tidak akan secara cepat menaikkan upah nominal. Sepanjang kontrak kerja diantara tenaga kerja dan majikan adalah tetap atau konstan walaupun dalam pasaran tidak terdapat keseimbangan di antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Sukirno, 2003).

Teori ekonomi klasik (antara lain Stopler-Samuelson) menunjukkan, koreksi harga relatif *input* (upah relatif terhadap biaya kapital) melalui liberalisasi ekonomi, akan mengarahkan alokasi faktor produksi dengan menggunakan *input* yang berlebih, dalam hal ini tenaga kerja. Teori ekonomi ini juga menunjukkan, untuk negara yang tenaga kerjanya berlimpah seperti Indonesia, liberalisasi ekonomi cenderung meningkatkan nilai produksi marjinal tenaga kerja relatif terhadap total *output*, sementara pangsa balas jasa faktor modal (keuntungan) cenderung akan menurun. Kenaikan pangsa nilai produksi marjinal tenaga ini akan meningkatkan tingkat upah riil. Dengan demikian, sebetulnya tidak akan terjadi keraguan bahwa dalam pasar yang makin bebas, kenaikan *marginal product of labor* (produktivitas tenaga kerja) akan selalu diikuti kenaikan upah riil. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak berarti banyak, bahkan hanya menciptakan distorsi baru dalam perekonomian.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja. Kebijakan Upah Minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan dan

meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).

Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konverisional (Kusnaini, D, 1998).

2.1.2.1 Fungsi Upah

- a. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya manusia secara efisien untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Untuk mengalokasikan secara efisien secara sumber daya manusia. Sistem pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja kearah produktif, mendorong tenaga kerja dari pekerjaan yang produktif kepekerjaan yang lebih produktif.
- c. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien. Pembayaran upah yang relatif tinggi adalah mendorong, memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis, dan efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah sesuai dengan keperluan hidupnya.

- d. Mendorong stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem pengupahan diharapkan dapat merangsang, mempertahankan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi dalam Upah Minimum

Tjiptoherijanto (2004) memaparkan dewasa ini paling tidak ada 5 (lima) faktor utama yang diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum, yaitu:

- a. Kebutuhan hidup minimum (KHM).
- b. Indeks harga konsumen (IHK) atau tingkat inflasi.
- c. Perluasan kesempatan kerja.
- d. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional.
- e. Tingkat perkembangan perekonomian daerah setempat.

Dari lima faktor di atas maka 3 faktor yaitu indeks harga konsumen, perluasan kesempatan kerja dan perkembangan perekonomian adalah faktor makro, sedangkan dua faktor lainnya yaitu kebutuhan hidup minimum dan regional pendapatan faktor yang bersifat mikro. Dari sudut kebutuhan hidup pekerja, terdapat 2 (dua) komponen yang menentukan yang menentukan upah minimum, yaitu: kebutuhan hidup minimum (KHM) dan inflasi. Berbagai bahan yang ada dalam komponen KHM dinilai dengan harga yang berlaku, sehingga menghasilkan tingkat upah. Oleh karena harga sangat bervariasi antar daerah serta adanya situasi-situasi lokal yang tidak mungkin berlaku secara nasional. Maka tingkat upah minimum tersebut disesuaikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau lebih sering disebut dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) (Tjiptoherijanto, 2004).

2.1.2.3 Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Secara teori, tidak ada pengaruh langsung antara upah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi

permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, semakin tinggi upah, semakin kecil permintaan akan tenaga kerja karena upah merupakan biaya bagi suatu perusahaan. Sebaliknya, dari sisi penawaran, semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang ingin bekerja. Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, semakin banyak output yang dihasilkan. Output yang tinggi akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan mengenai upah mempunyai dua sisi yang jika salah satu sisi tidak diperhatikan akan merugikan.

Perusahaan atau pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa tenaga kerja yang akan dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya dalam upaya menghasilkan output. Sedangkan angkatan kerja adalah pihak yang menawarkan jasa keahlian dan kemampuannya kepada sektor riil maupun sector lainnya, seperti pertanian, industri manufaktur, maupun jasa-jasa. Penentuan upah minimum oleh pemerintah dalam rangka memperhatikan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, perlu diarahkann kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah yang rendah, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Kenaikan pendapatan muncul dari perubahan dalam tenaga kerja, yaitu total jam kerja yang menghasilkan output yang lebih banyak. Perubahan produktivitas tersebut berarti perubahan dalam kenaikan penyerapan tenaga kerja (Lipsey, 1995).

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Dengan demikian pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Pekerja dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga pengusaha biasanya sangat hati-hati untuk meningkatkan upah (Jumriadi, 2010).

Upah berhubungan dengan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja, karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Apabila kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mempunyai keterampilan yang tinggi, maka upah yang akan diterima juga meningkat. Demikian pula jika upah yang diterima tenaga kerja sudah memadai, maka dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jika upah meningkat maka produktivitas meningkat dan penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Sebaliknya apabila produktivitas kerja rendah maka imbalan dalam bentuk upah juga rendah sehingga dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja.

2.1.3 Teori Jumlah Unit Usaha

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Teori klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap-tiap faktor-faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut, atau dengan kata lain jumlah usaha menghasilkan lowongan pekerjaan yang besar (Simanjuntak, 2001).

Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja juga bertambah. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja (Karib, 2012).

2.1.3.1 Hubungan Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Tri Wahyu (2004), penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha. Hubungan antara jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja adalah positif. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila jumlah unit usaha menurun maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Menurut Veronika Nuryanti (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.1.4 Teori Investasi

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok capital yang ada (*net addition to existing capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*) atau pembentukan modal (*capital formation*) mesin. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia

dalam perekonomian (Sukirno, 2000). Dengan demikian secara tersirat menurut Sukirno yang dimaksud investasi adalah penambahan *national stock of capital* atau penambahan persediaan capital secara nasional.

Menurut Sukirno (2000), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi ekonomi di masa depan, dan faktor-faktor lainnya.

Bertambahnya jumlah barang modal ini akan mendorong kinerja perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang dalam jumlah yang lebih besar. Pembentukan modal membawa kepada pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada. Jadi, pembentukan modal menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran, serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri. Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi. Pembentukan modal memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin meningkat. Jadi, pembentukan modal juga menguntungkan buruh (Jhigan, 2000).

Investasi dibedakan kedalam dua jenis utama yaitu investasi tetap (*fixed investment*), dan investasi persediaan (*inventory investment*). Joseph Alois Scumpeter membedakan investasi terpengaruh (*induced investment*) yaitu investasi yang besar kecilnya sangat tergantung atau dipengaruhi oleh perubahan di dalam pendapatan nasional, volume penjualan, keuntungan perusahaan dan investasi otonom (*autonomous investment*) yaitu investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang

bersifat jangka panjang seperti adanya penemuan baru, perkembangan teknologi dan sebagainya. Menentukan pola investasi sama pentingnya dengan menentukan laju pembentukan modal. Pola optimum investasi sebgai besar tergantung pada iklim investasi yang tersedia di negeri itu dan pada produktifitas marginal sosial dari berbagai jenis investasi. Berbagai macam criteria investasi itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Produktifitas Marginal Sosial, salah satu criteria pokok investasi ialah produktifitas marginal sosial. Menurut kriteria ini investasi harus dilakukan pada bidang dan arah yang mempunyai produktifitas marginal sosial yang tertinggi. Akan tetapi, memakai prinsip tersebut apa adanya tidaklah mungkin, karena pertumbuhan ekonomi mengandung berbagai perubahan, tidak saja perubahan dalam faktor sosial-ekonomi tetapi juga dalam selera, kebiasaan, kualitas dan kualitas penduduk dan teknologi, dan sebagainya.
2. Pilihan Teknologi, pilihan dalam teknik produksi juga mempengaruhi jumlah dan pola investasi. Apakah pilihan jatuh pada teknik produksi yang bersifat padat modal atau padat karya tergantung pada tujuan sosial dan tujuan ekonomi Negara itu.
3. Rasio Modal Output, di dalam menjatuhkan pilihan terhadap berbagai proyek investasi dan di dalam menentukan prioritas, rasio modal-output dari berbagai proyek harus diperbandingkan. Investasi harus dibatasi pada proyek-proyek yang memperkecil rasio modal-output. Asumsi yang mendasari kriteria ini adalah proyek-proyek yang akan dikerjakan bersifat silih ganti (substitut).

2.1.4.1 Jenis-jenis Investasi

Adapula jenis-jenis investasi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi yang terdorong (*induced investment*) dan investasi otonom (Autonomus Investment).

Investasi yang terdorong adalah investasi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, baik pendapatan daerah ataupun pendapatan pusat atau nasional. Investasi otonom adalah investasi yang dilakukan pemerintah karena disamping biayanya yang sangat besar juga investasi ini kurang memberikan keuntungan, dimana besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan daerah maupun pendapatan nasional.

b. Public Investment dan Private Investment

Public investment adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimaksud pemerintah disini adalah pemerintah pusat atau daerah. Sedangkan private investment adalah investasi yang dilakukan oleh swasta, dimana keuangan menjadi prioritas utama, berbeda dengan public investment yang diarahkan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

c. Domestic Investment dan Foreign Investment

Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan foreign investment adalah penanaman modal asing.

d. Gross Investment atau Net Investment

Gross investment adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu. Net investment adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

2.1.4.2 Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Di dalam pembangunan ekonomi ada dua model teori yang dapat menganalisis pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

a. Teori Investasi Keynes

Jhon Maynard Keynes mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep efisiensi marjinal (*marginal efficiency of capital / MEC*). MEC dapat di definisikan sebagai perolehan yang diharapkan atau pengeluaran capital tambahan. Tepatnya MEC adalah tingkat diskonto yang menyamakan aliran

perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari capital tambahan.

b. Teori Neo klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Solow (Arsyad,1999) menyebutkan bahwa peran kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi.

Teori Neoklasik tentang investasi merupakan teori tentang akumulasi kapital optimal. Menurut teori ini, kapital yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa kapital relative terhadap harga output. Harga jasa kapital pada gilirannya tergantung pada harga barang-barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan. Jadi menurut teori ini perubahan di dalam output atau harga dari jasa capital relative terhadap harga output akan mengubah atau mempengaruhi stok kapital yang diinginkan dan juga investasi.

Investasi tidak saja meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan kesempatan kerja. Investasi juga menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang terciptanya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi. Dengan adanya investasi, perusahaan membeli mesin, alat-alat dan perlengkapan untuk memperingan kerja dari tenaga kerja. Investasi juga membantu terciptanya swasembada suatu negara, membebaskan negara dari bantuan luar negeri dan mengurangi beban utang luar negeri. Investasi juga membantu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduk yang semakin meningkat. Kalau investasi menyebabkan penggunaan sumber alam secara tepat dan pendirian jenis industri, maka tingkat pendapatan bertambah dan kebutuhan rakyatpun terpenuhi.

Adapula faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para pelaku penanaman modal asing untuk menambahkan modalnya di negara sedang berkembang antara lain luasnya pasar domestik, upah tenaga kerja murah, dan faktor keamanan dan politik di negara sedang berkembang. Untuk itu, bagi negara sedang berkembang perlu melakukan beberapa langkah-langkah yang dapat menarik investor asing, antara lain, menjaga stabilitas politik dan keamanan, mendirikan perusahaan asuransi untuk menghindari kerugian apabila terjadi keadaan yang tidak aman, pemberian informasi kepada investor asing kepada ruang lingkup kesempatan investasi (Jhingan, 2003). Pembangunan ekonomi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya penumpukan modal dalam negeri sebesar-besarnya dan paling penting adalah kapasitas modal dari perusahaan supaya dinamika dan daya kreatif masyarakat dapat menimbulkan akumulasi modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Investasi dalam hal ini merupakan penanaman modal pada barang-barang modal atau juga disebut sebagai investasi langsung, karena investasi ini berkaitan erat dengan pembangunan sektor riil. Sedangkan sumber-sumber modal dalam negeri dapat diperoleh melalui tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, pajak atau tabungan paksa (Suparmoko, 2002).

Investasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu atau yang lainnya. Dengan begitu kesempatan kerja semakin meningkat sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Karib 2012). Sedangkan menurut Akmal (2010), investasi yang dilakukan dalam rangka penyediaan barang-barang modal seperti mesin dan perlengkapan produksi untuk meningkat hasil output akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena barang-barang modal tersebut membutuhkan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Semakin besar investasi yang dilakukan akan semakin banyak tenaga kerja yang

diminta, terutama investasi yang bersifat padat karya. Dengan demikian besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi dan mempunyai efek ganda yang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, maka investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional atau PDB, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan nasional. Dengan memperhitungkan efek pengganda, maka besarnya persentase pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan menjadi lebih besar dari besarnya persentase pertumbuhan investasi (Mankiw, 2003).

Kekurangan modal dalam proses ekonomi di negara berkembang adalah salah satu faktor yang menjadi penghambat negara tersebut untuk maju. Kekurangan modal ini disebabkan oleh rendahnya investasi. Selain kekurangan modal juga terjadi tekanan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tersebut dibarengi dengan belum seimbangannya kegiatan ekonomi khususnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga menciptakan permasalahan sosial ekonomi yang serius yaitu pengangguran. Melihat kondisi tersebut, maka peningkatan modal atau investasi sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian, oleh karenanya pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian melalui penghimpunan dana atau investasi baik dari pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) (Sukirno, 2000).

2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan

barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah). Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan.
2. Fungsi pengaturan, yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan.
3. Fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana.
4. Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif.
5. Fungsi koordinasi, yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (daerah).

Sadono Sukirno (2000) berpendapat pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu Nordiawan (2006). Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset

tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan asset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Aparatur

Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

2. Belanja Pelayanan Publik

Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis belanja yaitu hibah, subsidi, bantuan sosial, dan transfer.

4. Belanja tidak terduga

Pengeluaran yang disediakan untuk :

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pengolahan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Pada umumnya perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment*. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal, moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak (Mankiw, 2007).

2.1.5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengeluaran pemerintah adalah bukan hal disembunyikan lagi. Adapun klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Pemerintah adalah satu institusi yang dapat melakukan beberapa hal lebih baik dari swasta atau individu. Fungsi pemerintah ada tiga hal yang relevan dengan keuangan Negara adalah redistribusi pendapatan, penyediaan barang publik dan perlindungan sosial. Fungsi distribusi merupakan fungsi utama pemerintah, dimana distribusi pendapatan yang merata antar penduduk merupakan menjadi alat monitoring secara berkesinambungan mengingat kekuatan mekanisme pasar yang terbentuk tidak bisa menciptakan alokasi distribusi pendapatan yang merata.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti tentang penyerapan tenaga kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Secara ringkas disajikan ringkasan penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dan inspirasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rizky Eka Putra (2012)

“Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, variabel penelitian adalah nilai investasi, nilai upah, nilai produksi sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan antara nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi dan terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Nenek Woyanti dan Ayu Wafi Lestari (2011)

“Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten

Semarang”. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Variabel unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Kabupaten Semarang.
 - b. Variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
 - c. Variabel nilai investasi pada Industri Kecil dan Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
 - d. Variabel Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
 - e. Secara simultan atau bersama-sama variabel unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
3. Ariyanto (2010)

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985 - 2007”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk analisis kuantitatif mengenai faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan data deret waktu (*time series*) antara tahun 1985-2007. Pencarian data terutama pada berbagai sumber atau instansi yang terkait dengan penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*).

Berdasarkan hasil analisis ECM (*Error Correction model*), dapat disimpulkan bahwa: pertama, pertumbuhan PDRB ternyata tidak memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, nilai ekspor mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

4. Nelsen Diyan Pratama (2012)

”Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk analisis kuantitatif yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan data deret waktu (*time series*). Alat analisis yang digunakan Dalam penelitian ini adalah analisis Regresi linear berganda. Variabel yang digunakan adalah: variabel terikat adalah penyerapan tenaga kerja, dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah investasi, usia usaha, dan jenis industri.

Dari hasil analisis yang menggunakan Regresi Linier berganda dapat disimpulkan bahwa sektor industri merupakan sektor yang berperan penting dalam menyumbang PDRB Kabupaten Jepara dan juga dalam penyerapan tenaga kerja terutama pada industri kecil. Dan di dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil serta mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
“Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Investasi 2) Upah 3) Nilai Produksi 4) Penyerapan Tenaga Kerja 	Metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda dengan dianalisis dengan menggunakan Program SPSS 16 for windows	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan antara nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi dan terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
“Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Semarang”.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permintaan Tenaga Kerja 2) Unit usaha 3) Nilai investasi 4) Upah minimum Kabupaten 	Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi berganda.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang. Secara parsial upah minimum kabupaten berpengaruh negative dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.
“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyerapan tenaga kerja 2) PDRB 3) Pengeluaran Pemerintah 4) Ekspor 	Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kepustakaan, data sekunder, dengan menggunakan	Berdasarkan hasil analisis ECM (Error Correction model), dapat disimpulkan bahwa: pertama, pertumbuhan PDRB ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif

		data deret waktu dengan menggunakan ECM (Error Correction Model).	terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Nilai ekspor mempunyai pengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.
Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Kabupaten Jepara	1) Penyerapan Tenaga kerja 2) Investasi 3) Usia usaha 4) Jenis industri	Alat analisis yang digunakan Dalam penelitian ini adalah analisis Regresi linear berganda	Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting dalam menyumbang PDRB Kabupaten Jepara dan juga dalam penyerapan tenaga kerja terutama pada industri kecil. dan di dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil serta mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh.

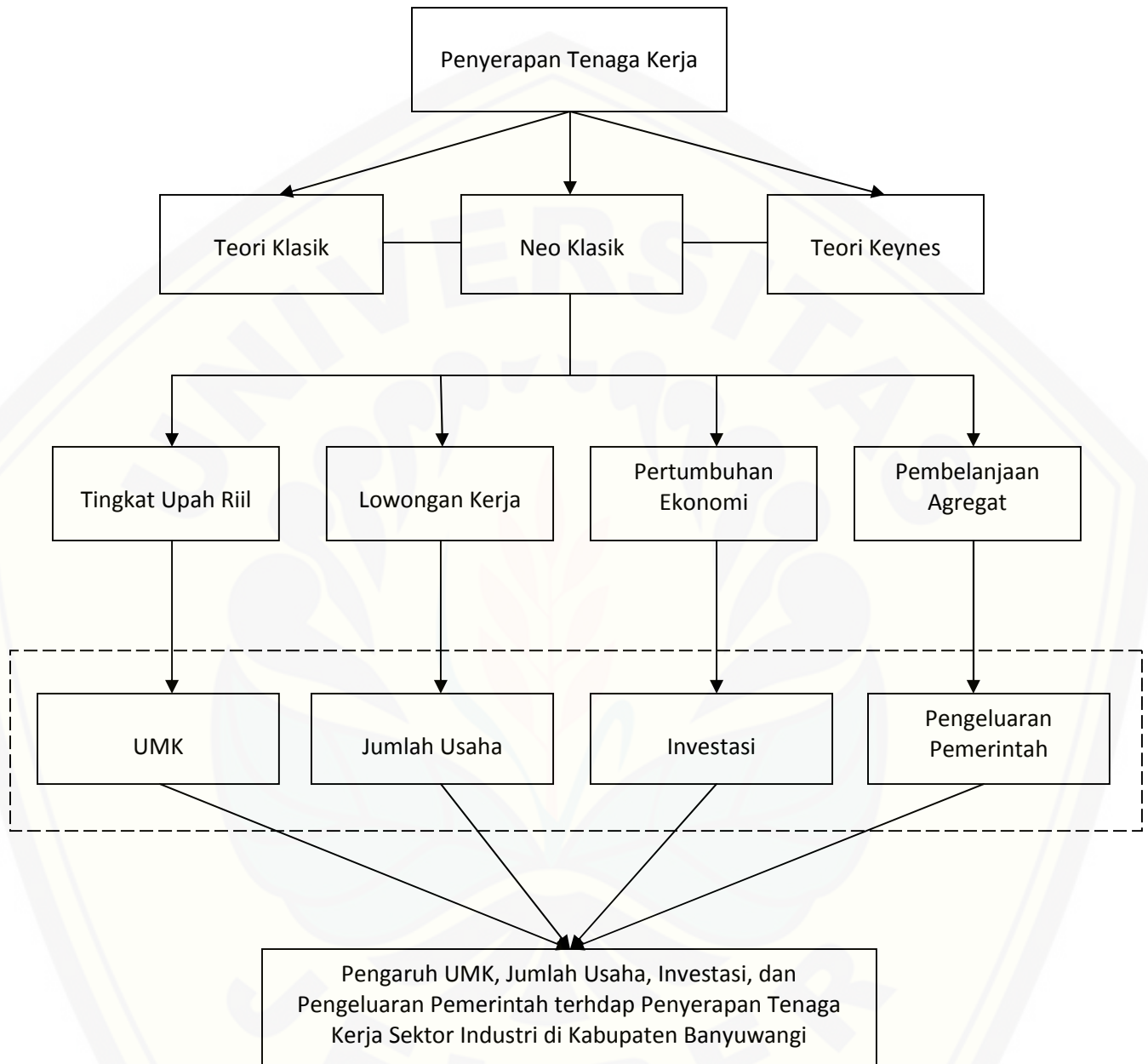
Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMK, jumlah usaha, investasi, pengeluaran pemerintah, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda

3. Hasil penelitian ini menghasilkan secara simultan maupun parsial terdapat pengaruh signifikan antara UMK, jumlah usaha, nilai investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.
4. Objek penelitian serta periode penelitian yang dilakukan.

2.3 Kerangka Konseptual

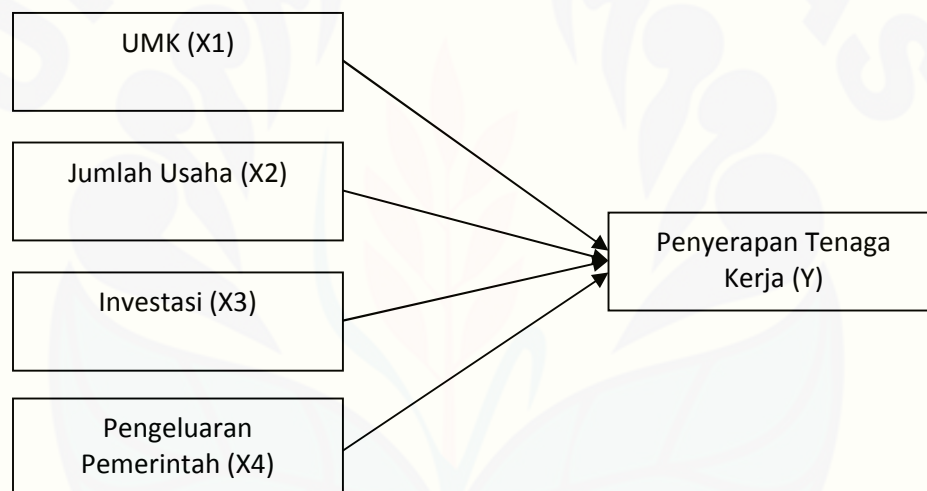
Dalam mewujudkan penyerapan tenaga kerja yang terjamin di sektor industri dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, di Kabupaten Banyuwangi menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya. Untuk melihat pengaruh tingkat UMK, jumlah usaha, investasi, pengeluaran pemerintah dan terhadap penyerapan tenaga kerja maka digunakan analisis Regresi Berganda (*time series*). Untuk mempermudah kegiatan penelitian serta memperjelas akar pemikiran dalam penelitian, digambarkan suatu kerangka konseptual pemikiran yang sistematis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pemikiran

Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai pedoman dan dapat menunjukkan alur pemikiran penelitian. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda. Kerangka konseptual menggambarkan UMK (X1), jumlah usaha

(X2), investasi (X3), dan pengeluaran pemerintah (X4) sebagai variabel bebas dan keempat variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Kerangka pemikiran konseptual ini menunjukkan bahwa UMK (X1), jumlah usaha (X2), investasi (X3), dan pengeluaran pemerintah (X4) secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Selain itu, kerangka pemikiran konseptual ini juga menunjukkan bahwa UMK (X1), jumlah usaha (X2), investasi (X3), dan pengeluaran pemerintah (X4) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Dalam kerangka teori diatas, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

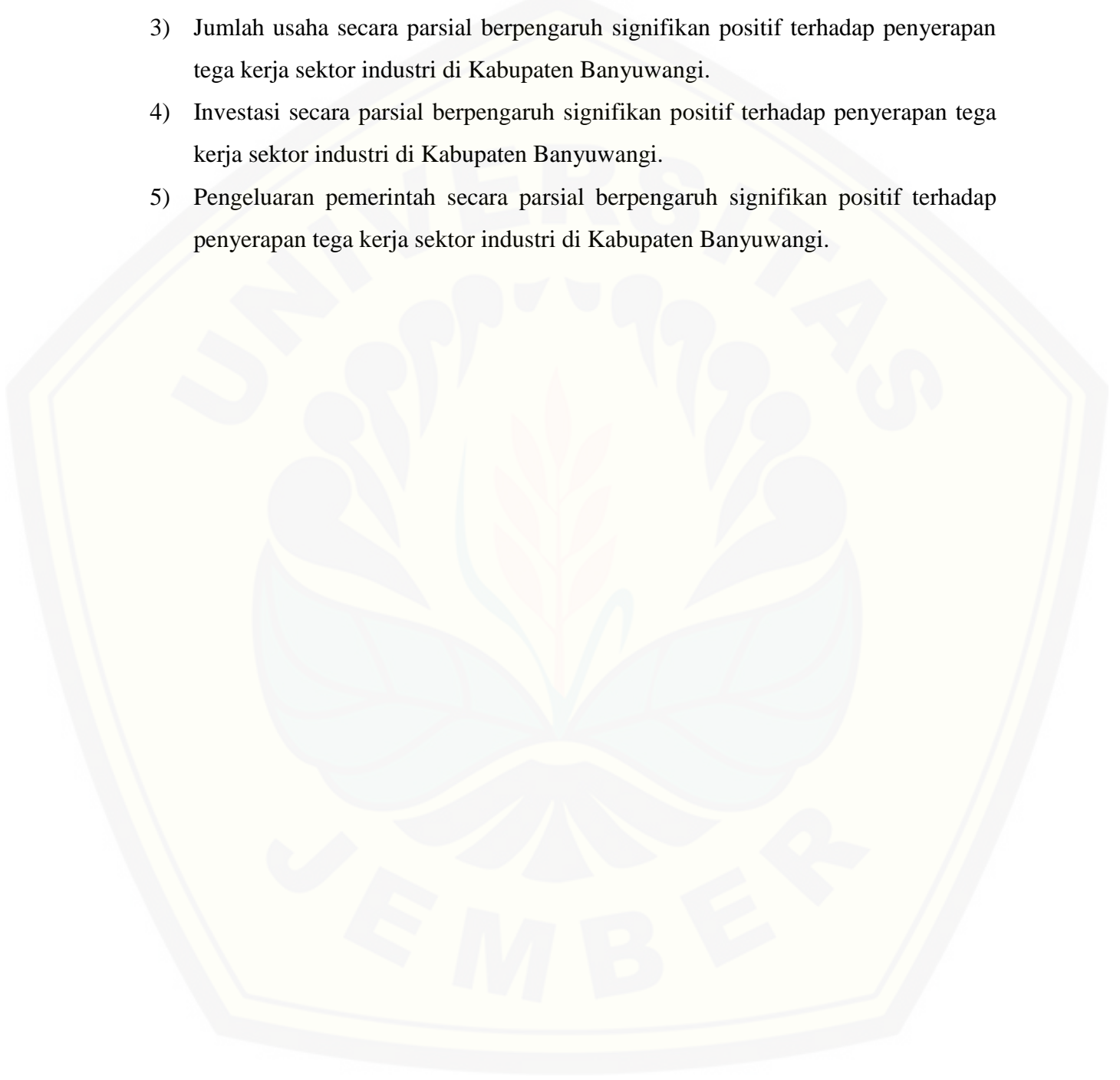


2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka disusunlah hipotesis dari penelitian ini adalah :

- 1) UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh secara signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.

- 2) UMK secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.
- 3) Jumlah usaha secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.
- 4) Investasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.
- 5) Pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori. Yang dimaksud dengan eksplanatori adalah penelitian yang menggunakan suatu metode yang menjelaskan secara sistematis, flaktual dan akurat mengenai suatu obyek yang diteliti dan bertujuan untuk mencari ada dan tidaknya pola hubungan dan sifat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menguji hipotesis bahkan menemukan teori baru (Nazir, 1998).

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja dalam sektor industri di Kabupaten Banyuwangi dengan UMK, jumlah usaha, investasi, dan penyerapan tenaga kerja serta mengetahui variabel manakah yang berpengaruh signifikan dan positif dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data runtut waktu (*time series*) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Penelitian ini menggunakan data skunder UMK, jumlah usaha, investasi, pengeluaran pemerintah, dan penyerapan tenaga kerja mulai tahun 2004-2013.

3.3.2 Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder diperoleh dari badan keuangan dan asset daerah, disperindag dan pertambangan, dinas

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan badan pusat statistik (BPS) di Kabupaten Banyuwangi. Adapun data yang digunakan adalah data time series dari tahun (2004-2013).

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari jumlah orang yang berkerja pada sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.
2. Data upah minimum Kabupaten Banyuwangi mencakup data upah minimum yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi.
3. Jumlah unit usaha sektor industri di Kabupaten Banyuwangi.
4. Data investasi sektor industri Kabupaten Banyuwangi.
5. Pengeluaran pemerintah sektor industri Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 2004-2013. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang dipergunakan meliputi: data penyerapan tenaga kerja, data upah minimum, data jumlah unit usaha, data tingkat investasi, dan data pengeluaran pemerintah. Data-data ini diperoleh dari badan keuangan dan asset daerah, disperindag dan pertambangan, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan badan pusat statistik (BPS) di Kabupaten Banyuwangi.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya yang dilakukan apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Metode ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus

mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain : data berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi.

a. Uji Normalitas Model

1) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013:56). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan () sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Latan, 2013:56). Kriteria pengujian dengan melihat besaran *kolmogorov-smirnov test* adalah;

- a) Jika signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal
- b) Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian dari asumsi untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Gejala multikolinearitas juga dapat dideteksi dengan melihat besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinearitas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:66). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson (D-W)* untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson statistik terletak -2 sampai dengan +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5% (Sarwono, 2013:52).

3.5.2 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12).

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi variabel yang mempengaruhi disebut *independent variable* (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi disebut *dependent variable* (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat salah satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai regresi sederhana, sedangkan jika variabelnya bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda (Prayitno, 2010:61).

Untuk mengetahui pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi, digunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut (Prayitno, 2010:61) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| a | = bilangan konstanta |
| b_1, b_2, b_3, b_4 | = koefesien regresi linier berganda |
| X_1 | = besarnya pengaruh UMK |
| X_2 | = besarnya pengaruh jumlah usaha |

X ₃	= besarnya pengaruh investasi
X ₄	= besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah
Y	= penyerapan tenaga kerja
e	= faktor gangguan

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah :

a. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat (Prayitno, 2010:67). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄, secara simultan terhadap variabel Y. Rumus yang akan digunakan adalah :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - k)}$$

Keterangan :

F = pengujian secara simultan

R² = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel

n = banyaknya sampel

Formulasi hipotesis uji F ;

1) H₀ : b₁, b₂, b₃, b₄ ≠ 0

H₀ ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (X₁, X₂, X₃ dan X₄) terhadap variabel terikat (Y)

2) H_a : b₁, b₂, b₃, b₄ = 0

H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada pengaruh simultan antara variabel bebas (X_1, X_2, X_3 dan X_4) terhadap variabel terikat (Y)

3) *Level of significane* 5%.

b. Uji t

Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan tidaknya pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi. Rumusnya adalah (Prayitno, 2010:68) ;

$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan :

t = test signifikan dengan angka korelasi

b_i = koefisien regresi

Se (b_i) = *standard error* dari koefisien korelasi

Formulasi hipotesis uji t ;

1) $H_0 : b_i = 0, i = 1, 2, 3, 4$

H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

2) $H_a : b_i \neq 0, i = 1, 2, 3, 4$

H_0 ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

3) *Level of significane* 5% (Uji 2 sisi, 5% : 2 = 2,5% atau 0,025)

c. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi adalah data untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut bisa dibenarkan. Dari koefisiensi determinasi (R^2) dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y (Prayitno, 2010:66).

$$R^2 = \frac{b^1 X_1 Y + b^2 X_2 Y + b^3 X_3 Y + b^4 X_4 Y}{Y^2}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi berganda

Y = Variabel terikat (*dependent*)

X = Variabel bebas (*Independent*)

b = Koefisien regresi linier

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikat. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya titik pusat dari suatu penelitian. sementara itu, maksud dari variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Arikunto, 1998). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penyerapan tenaga kerja adalah penduduk di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang bekerja atau diserap oleh sektor industri yang dinyatakan dalam Jiwa/Tahun.
2. Upah minimum merupakan batas bawah upah yang ditetapkan pemerintah bagi para pekerja paling rendah (UMK), dinyatakan dalam Rupiah/Bulan.

3. Jumlah usaha sektor industri adalah jumlah industri dari suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, dinyatakan dalam Unit/Tahun.
4. Investasi sektor industri adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, dinyatakan dalam Rupiah/Tahun.
5. Pengeluaran pemerintah adalah diperoleh dari anggaran realisasi anggaran belanja masing-masing kabupaten pada tahun yang bersangkutan, dinyatakan dalam tahun Rupiah/Tahun.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

4.1.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Pelabuhan Ketapang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pelabuhan Gilimanuk di Bali.

Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pesanggaran | 13. Srono |
| 2. Siliragung | 14. Rogojampi |
| 3. Bangorejo | 15. Kabat |
| 4. Purwoharjo | 16. Singojuruh |
| 5. Tegaldlimo | 17. Sempu |
| 6. Muncar | 18. Songgon |
| 7. Cluring | 19. Glagah |
| 8. Gambiran | 20. Licin |
| 9. Tegalsari | 21. Banyuwangi |
| 10. Glenmore | 22. Giri |
| 11. Kalibaru | 23. Kalipuro |
| 12. Genteng | 24. Wongsorejo |

a. Geografi

Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur. Luasnya 5.782,50 km². Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan

perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m), keduanya adalah gunung api aktif.

Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan kawasan pengembangan penyu. Di Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Di Muncar terdapat pelabuhan perikanan.

b. Transportasi

Ibukota Kabupaten Banyuwangi berjarak 239 km sebelah timur Surabaya. Banyuwangi merupakan ujung paling timur jalur pantura serta titik paling timur jalur kereta api Pulau Jawa Pelabuhan Ketapang terletak di kota Banyuwangi bagian utara, menghubungkan Jawa dan Bali dengan kapal *ferry*, LCM, ro-ro dan tongkang. Dari Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dapat dicapai dari dua jalur jalan darat, jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara merupakan bagian dari jalur pantura yang membentang dari Anyer hingga pelabuhan Panarukan dan melewati kabupaten Situbondo. Sedangkan jalur selatan merupakan pecahan dari jalur pantura dari Kabupaten Probolinggo melewati Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, di kedua jalur tersebut tersedia bus eksekutif (pattas) maupun ekonomi.

Terdapat pula moda transportasi darat lainnya, yaitu jalur kereta api Surabaya – Pasuruan – Probolinggo – Jember dan berakhir di Banyuwangi. Untuk transportasi wilayah perkotaan terdapat moda angkutan mikrolet, taksi Using Transport serta *colt* yang melayani transportasi antar Kecamatan dan minibus yang melayani trayek Banyuwangi dengan kota-kota kabupaten di sekitarnya. Bandara Blimbingsari di Kecamatan Rogojampi dalam pembangunannya sempat tersendat akibat kasus

pembebasan lahan, dan memakan korban 2 bupati yang menjabat dalam masa pembangunannya yaitu Bupati Samsul Hadi dan Bupati Ratna Ani Lestari. Dan pada tanggal 28 Desember 2010, Bandar Udara Blimbingsari telah dibuka untuk penerbangan komersial Banyuwangi (BWW) – Denpasar (DPS) – Banyuwangi (BWW) dan Banyuwangi (BWW) – Surabaya (SUB) – Banyuwangi (SUB), per tanggal 24 Agustus 2011 Maskapai Merpati Airlines membuka penerbangan dari Banyuwangi dengan tujuan Surabaya, Semarang, dan Bandung.

c. Penduduk

Penduduk Banyuwangi cukup beragam. Mayoritas adalah Suku Osing, namun terdapat Suku Madura (kecamatan Wongsorejo, Bajulmati, Glenmore dan Kalibaru) dan Suku Jawa yang cukup signifikan, serta terdapat minoritas Suku Bali dan Suku Bugis. Suku Osing merupakan penduduk asli kabupaten Banyuwangi dan bisa dianggap sebagai sebuah sub-suku dari suku Jawa. Mereka menggunakan Bahasa Osing, yang dikenal sebagai salah satu ragam tertua Bahasa Jawa. Kesenian asal Banyuwangi adalah kuntulan, gandrung, jaranan, barong, janger dan seblang. Suku Osing banyak mendiami di Kecamatan Rogojampi, Songgon, Kabat, Glagah, Giri, Kalipuro, Kota serta sebagian kecil di kecamatan lain. Bahasa dan budaya suku Osing banyak dipengaruhi oleh bahasa dan budaya Bali.

4.1.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian yang paling Timur dari Wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak diantara koordinat 7 43 – 8 46 Lintang Selatan dan 113 53 – 114 38 Bujur Timur dan dengan ketinggian antara 25 - 100 meter di atas permukaan laut. Kabupaten memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km yang membujur sepanjang batas selatan timur Kabupaten Banyuwangi, serta jumlah pulau ada 10 buah.

Batas-batas wilayah Kabupaten Banyuwangi :

1. Utara Kabupaten Situbondo dan Bondowoso
2. Timur Selat Bali
3. Selatan Samudera Indonesia
4. Barat Kabupaten Jember dan Bondowoso

Tabel 4.1 Luas Kabupaten Banyuwangi 578.250 Ha atau 5.782,50 Km² yang terdiri dari :

Jenis Lahan	Luas
1. Hutan	180.939,78 Ha
a. Hutan Lindung	36.570,40 Ha
b. Hutan Produksi	78.926,13 Ha
c. Hutan Konservasi	
- Taman Nasional	65.451,25 Ha
- Cagar Alam	1.514,25 Ha
- Taman Wiasata	102,00 Ha
d. Hutan Kritis	0,00 Ha
2. Persawahan / Sawah	66.487,00 Ha
a. Sawah Irigasi Teknis	63.589,00 Ha
b. Sawah Irigasi 1/2 Teknis	2.068,00 Ha
c. Sawah Irigasi Sederhana	830,00 Ha
d. Sawah Taadah Hujan	0.00 Ha
3. Lahan Kering	230.094,78 Ha
a. Tegalan	16.215,33 Ha
b. Kebun Campuran	2.161,10 Ha
c. Perkebunan Rakyat	31.097,30 Ha
d. Perkebunan Besar	51.046,33 Ha
e. Pemukiman	127.454,22 Ha
f. Tambak	1.782,50 Ha
g. Tanah Rusak / Tandus	338,00 Ha
4. Lain-lain	100.730,44 Ha

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi

4.1.1.3 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Dari gambaran umum variabel penelitian tersebut, terdapat 5 macam variabel penelitian. Diantaranya yaitu adalah penyerapan tenaga kerja, UMK, investasi, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dari lampiran dibawah dapat saya jelaskan perkembangan penyerapan tenaga kerja sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kabupaten Banyuwangi

Tahun	L	P	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	Perkembangan %
2004	22.513	24.330	46.843	
2005	22.630	24.300	46.930	0,9
2006	23.284	23.854	47.138	0,4
2007	23.290	25.548	48.838	3,6
2008	23.312	25.816	49.128	0,6
2009	23.315	25.817	49.132	0,0
2010	35.442	37.046	72.488	46,8
2011	35.842	39.594	75.436	4,1
2012	25.250	28.023	53.273	-29,0
2013	28.410	29.827	58.237	9,3
Rata-rata				3,67

Sumber : Dinsos, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi

Pada tabel 4.2, dari perkembangan setiap tahunnya penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Banyuwangi dari jumlah penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan dapat diketahui presentase kenaikan dan penurunan setiap tahunnya mulai dari tahun 2004-2013. Dari tabel diatas setiap tahunnya terjadi perkembangan kenaikan ataupun penurunan yang sangat tidak stabil. Yaitu mulai tahun 2009-2010 mengalami kenaikan sebesar 46,8 persen paling tinggi dari tahun yang lainnya selama kurun waktu 10 tahun. Sedangkan mengalami penurunan paling

drastis yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar -29,0 persen dari jumlah data yang ada selama 10 tahun. Dari perkembangan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya yaitu jumlah rata-rata selama 10 tahun sebesar 3,67.

Tabel 4.3 Data UMK di Kabupaten Banyuwangi

Tahun	UMK	Perkembangan %
2004	372.000	
2005	372.000	0
2006	483.300	29,9
2007	567.000	17,3
2008	619.000	9,1
2009	744.000	20,1
2010	824.000	10,7
2011	865.000	5,0
2012	915.000	5,7
2013	1.086.000	18,6
Rata-rata		11,64

Sumber : Kabupaten Banyuwangi dalam angka BPS tahun 2004-2013

Pada tabel 4.3, dapat dilihat perkembangan kenaikan maupun penurunan UMK pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2004-2013. Yaitu pada tahun 2004-2005 tidak ada kenaikan maupun penurunan sama sekali (tetap), dan dari tabel diatas selama kurun waktu 10 tahun perkembangan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2005-2006 yaitu mengalami peningkatan UMK paling besar dibanding tahun-tahun yang lainnya sebesar 29,9 persen. Dari jumlah selama 10 tahun tersebut rata-rata perkembangan kenaikan maupun penurunan UMK yaitu sebesar 11,64 persen.

Tabel 4.4 Data Jumlah Usaha sektor industri di Kabupaten Banyuwangi

Tahun	JUMLAH USAHA	Perkembangan %
2004	10.810	
2005	11.000	1,7
2006	11.200	1,8
2007	11.265	0,6
2008	11.326	0,5
2009	11.377	0,4
2010	15.076	32,5
2011	15.808	4,8
2012	16.798	6,3
2013	17.610	4,8
Rata-rata		5,34

Sumber : Disperindag dan Pertambangan di Kabupaten Banyuwangi

Pada tabel diatas dapat dilihat perkembangan jumlah usaha dari setiap tahunnya pada tahun 2004-2013. Pada tahun 2004-2006 jumlah usaha mengalami kenaikan, dan pada 2006-2009 mengalami penurunan. Sedangkan jumlah usaha sektor industri di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009-2010 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 32,5 persen. Pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan yaitu seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. Dari data 10 tahun jumlah industri yang ada dapat dilihat rata-rata perkembangan penurunan maupun kenaikan jumlah unit usaha sebesar 5,34 persen.

Tabel 4.5 Data Investasi sektor industri di Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Niai Investasi (miliar rupiah)	perkembangan %
2004	140,80	
2005	143,20	1,7
2006	144,00	0,5
2007	149,00	3,5
2008	150,30	0,9
2009	151,80	1,0
2010	153,40	1,0
2011	154,90	1,0
2012	494,40	219,1
2013	686,04	38,8
Rata-rata		26,45

Sumber : Disperindag dan Pertambangan di Kabupaten Banyuwangi

Pada tabel diatas dapat dilihat hasil perkembangan nilai investasi sektor industri dari setiap tahunnya selama waktu 10 tahun. Yaitu pada tahun 2004-2011 tidak begitu mengalami kenaikan maupun penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2005-2006 mengalami penurunan sebesar 0,5 persen atau dibilang paling rendah dari jumlah 10 tahun yang ada. Dan pada nilai investasi pada tahun 2011-2012 mengalami kenaikan yang begitu pesat (besar) sebesar 219,1 pesen atau dibilang paling tinggi dari jumlah waktu yang ada. Dari keseluruhan perkembangan mulai tahun 2004-2013 dapat dilihat rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 26,45 persen.

Tabel 4.6 Data Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (miliar rupiah)	Perkembangan %
2004	544,39	
2005	677,21	24,4
2006	815,82	20,5
2007	869,42	6,6
2008	951,27	9,4
2009	1.105,49	16,2
2010	1.219,98	10,3
2011	1.443,02	18,3
2012	1.683,01	16,7
2013	1.933,42	18,4
Rata-rata		14,8

Sumber : Badan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Banyuwangi

Pada tabel di atas dapat dilihat perkembangan hasil pengeluaran pemerintah di Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2004-2013. Yaitu dari data 10 tahun yang ada perkembangannya hampir sejajar dari setiap tahunnya. Pada tahun 2006-2008 mengalami nilai perkembangan yang cukup kecil / sedikit dibanding tahun-tahun yang ada. Pada tahun 2004-2005 mengalami nilai pengeluaran pemerintah yang begitu besar yaitu sebesar 24,4 persen. Yaitu dari kurun waktu kurun waktu 10 tahun mengalami perkembangan yang begitu besar. Dari tahun 2004-2013 dapat dilihat rata-rata keseluruhan perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 14,8 persen.

4.1.2 Analisis Data

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised*

Estimator) (Gujarati dalam Latan, 2013:14). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain yaitu : model berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, dan tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model regresi linear berganda yang dijelaskan sebagai berikut ;

a. Uji Normalitas *Kolmogorov-smirnov Test*

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan () sebesar 5% (Latan, 2013:23).

Adapun hasil pengujian dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

<i>Test of Normality</i>	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>			Keterangan	
	Sig.		<i>Cutt off</i>		
UMK (X_1)	0,999	>	0,05	Normal	
Jumlah usaha (X_2)	0,173	>	0,05	Normal	
Pengujian ke 1	Investasi (X_3)	0,026	<	0,05	Tidak Normal
	Pengeluaran pemerintah (X_4)	0,977	>	0,05	Normal
	Penyerapan (Y)	0,331	>	0,05	Normal
Pengujian ke 2	Predicted Value	0,474	>	0,05	Normal

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.7, pada pengujian ke 1, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel ada yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini belum berdistribusi normal. Pada pengujian ke 2, diketahui nilai predicted value lebih

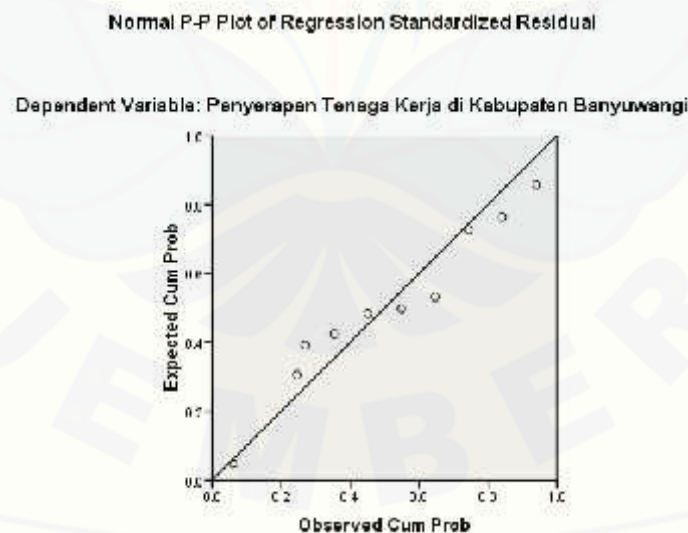
besar dari 0,05, maka dapat diasumsikan keseluruhan data memiliki nilai prediksi yang berdistribusi normal.

b. Uji Normalitas Model

Uji normalitas model bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013:42). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Adapun hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.1, sebagai berikut ;



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Model

Gambar 4.1, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinieritas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinieritas ;

Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas

<i>Test of Multikolinierity</i>	VIF		<i>Cutt off</i>	Keterangan
UMK (X_1)	5,693	<	10	Tidak terjadi multikolinieritas
Jumlah usaha (X_2)	3,506	<	10	Tidak terjadi multikolinieritas
Investasi (X_3)	7,467	<	10	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengeluaran pemerintah (X_4)	6,801	<	10	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Lampiran 3

Tabel 4.8, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel *independen* karena menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

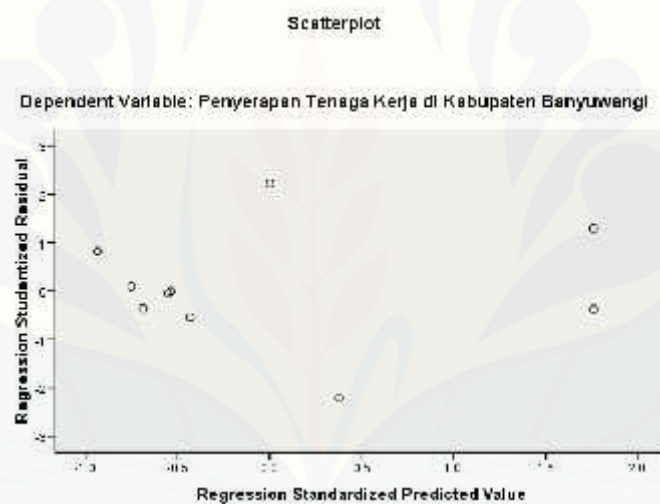
d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada

suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:39). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.2, sebagai berikut ;



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2, menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas, karena tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

e. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan

melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson (D-W)* untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai *Durbin-Watson* statistik terletak -2 sampai dengan +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5% (Sarwono, 2013:52).

Tabel 4.9 Uji Autokorelasi

Nilai D-W	Keterangan
1,531	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.9. diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* dari persamaan diatas pada penelitian ini berada diantara -2 sampai dengan +2, maka dapat diartikan bahwa dari kedua model persamaan regresi yang telah dirumuskan tidak terjadi autokorelasi.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12). Adapun hasil uji Analisis Deskriptif Statistik ;

Tabel 4.10 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean
UMK (X_1)	10	372000	1068400	685000
Jumlah usaha (X_2)	10	10810	17610	13200
Investasi (X_3)	10	14080	68604	23700
Pengeluaran pemerintah (X_4)	10	54439	193342	112000
Penyerapan (Y)	10	46843	75436	54700
Valid N (listwise)	10			

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.10, berkaitan dengan analisis deskriptif statistik dapat dilihat bahwa dengan jumlah data sebanyak 10, variabel penyerapan tenaga kerja (Y) mempunyai rata-rata sebesar 54700 tenaga kerja dengan nilai minimal 46843 tenaga kerja dan maksimal 75436 tenaga kerja. Variabel UMK (X_1) mempunyai rata-rata Rp. 685.000, dengan nilai minimal Rp. 372.000 dan maksimal Rp. 1.068.400. Variabel jumlah usaha (X_2) mempunyai rata-rata 13200 unit usaha, dengan nilai minimal 10.810 unit usaha dan maksimal 17.610 unit usaha. Variabel investasi (X_3) mempunyai rata-rata sebesar Rp. 23,700 Milliar, dengan nilai minimal Rp. 14,080 Milliar dan maksimal Rp. 68,604 Milliar. Variabel pengeluaran pemerintah (X_4) mempunyai rata-rata sebesar Rp. 1,12000 Milliar, dengan nilai minimal Rp. 5,4439 Milliar dan maksimal Rp. 19,3342 Milliar.

4.1.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel *dependen* pada satu atau lebih variabel *independen* dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel *independen* yaitu UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah, serta variabel *dependen*

yaitu penyerapan. Berikut pada Tabel 4.11 disajikan hasil analisis regresi linear berganda ;

Tabel 4.11 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel Independent	<i>Unstandardized</i> Coefficients B	t	t _{tabel}	Sig.	<i>a</i>	Keterangan
(Constant)	-12752,471	-	-	-	-	-
UMK (X ₁)	0,423	4,126	> 2,570	0,011	< 0,05	Signifikan
Jumlah usaha (X ₂)	0,459	4,320	> 2,570	0,004	< 0,05	Signifikan
Investasi (X ₃)	0,329	3,161	> 2,570	0,026	< 0,05	Signifikan
Pengeluaran pemerintah (X ₄)	0,360	3,340	> 2,570	0,018	< 0,05	Signifikan
<i>Adjusted R Square = 0,783</i>				F. Hitung = 5,588 Sig. F = 0,042		

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah ;

$$Y = -12752,471 + 0,423X_1 + 0,459X_2 + 0,329X_3 + 0,360X_4$$

- Nilai konstanta -12752,471, menunjukkan bahwa jika UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah tidak berubah atau constant, maka nilai penyerapan tenaga kerja menurun sebesar -12752,471;
- Nilai koefisien 0,423 pada UMK, menunjukkan bahwa setiap kenaikan UMK 1 satuan, maka hal tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,423, dan sebaliknya;
- Nilai koefisien 0,459 pada jumlah usaha, menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah usaha 1 satuan, maka hal tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,459, dan sebaliknya;

- d. Nilai koefisien 0,329 pada investasi, menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi 1 satuan, maka hal tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,329, dan sebaliknya;
- e. Nilai koefisien 0,360 pada pengeluaran pemerintah, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah 1 satuan, maka hal tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,360, dan sebaliknya.

4.1.2.4 Uji Hipotesis

4.1.2.4.1 Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap variabel *dependen* yaitu penyerapan tenaga kerja secara simultan. Tabel distribusi F dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) df_1 atau $5-1 = 4$, dan df_2 $n-k-1$ atau $10-4-1 = 5$. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($5,588 > 5,19$) dan signifikansi ($0,042 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi.

4.1.2.4.2 Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen* secara signifikan secara parsial. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ (uji 2 sisi, $0,05 : 2 = 0,25$), dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $10-4-1 = 5$. Hasil analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap variabel *dependen* yaitu penyerapan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear

berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut ;

- a. Variabel UMK (X_1) memiliki nilai t $4,126 > 2,570$ dan signifikansi $0,011 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel UMK berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi. t_{hitung} positif, maka jika ada peningkatan pada variabel UMK maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- b. Variabel jumlah usaha (X_2) memiliki nilai t $4,320 > 2,570$ dan signifikansi $0,004 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel jumlah usaha berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi. t_{hitung} positif, maka jika ada peningkatan pada variabel jumlah usaha maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- c. Variabel investasi (X_3) memiliki nilai t $3,161 > 2,570$ dan signifikansi $0,026 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi. t_{hitung} positif, maka jika ada peningkatan pada variabel investasi maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- d. Variabel pengeluaran pemerintah (X_4) memiliki nilai t $3,340 > 2,570$ dan signifikan $0,018 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi. t_{hitung} positif, maka jika ada peningkatan pada variabel pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

4.1.2.4.3 Koefisien Determinasi

Berfungsi untuk mengetahui besarnya proporsi atau sumbangan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara keseluruhan, maka dapat

ditentukan dengan uji koefisien determinasi berganda (R^2). Dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda, hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* (R^2) menunjukkan sebesar 0,783 atau 78,3% dan sisanya 21,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti jumlah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk dan besarnya jumlah pengangguran.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi. Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi dengan arah positif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan, “ada pengaruh UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi” adalah diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa jika UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah, memiliki nilai positif, maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa apabila UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah tidak berubah (constant), maka terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar (-12752,471). Masalah multivariate constant negatif karena variabel bebas akan semakin kuat untuk digunakan memprediksi variabel tergantung. Karena prediktor-prediktor sudah distandarisasi,

maka hal tersebut memungkinkan untuk membandingkan kekuatan relatif hubungan atau bobot mereka dengan variabel tergantungnya. Jika tidak terdapat tanda (positif atau negatif), maka diinterpretasikan hubungan kedua variabel positif. Hubungan positif bermakna jika nilai pada prediktor tinggi, maka nilai pada variabel tergantung juga tinggi. Sebaliknya jika terdapat tanda negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut negatif. Hubungan negative mempunyai makna jika nilai pada predictor tinggi, maka nilai pada variabel tergantung rendah (Sarwono, 2013).

Adapun pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja menurun yaitu menurut Payaman Simanjuntak (2001) menilai penurunan penyerapan tenaga kerja sektor ini terjadi karena berkurangnya minat dalam berinvestasi di jasa kemasyarakatan. Investasi di bidang industri menurun, kemudian permintaan masyarakat untuk bidang-bidang jasa itu juga menurun. Turunnya penyerapan tenaga kerja disebabkan investasi yang melambat akibat naiknya suku bunga. Meski demikian, pemerintah optimistis penyerapan tenaga kerja akan naik, terutama setelah imbas dari sektor manufaktur dengan orientasi ekspor yang mulai meningkat karena ada permintaan kenaikan (upah) dikaitkan dengan produktivitas. Jadi bukan hanya upah, tapi elemen upah juga penting untuk diperbaiki agar permintaan tenaga kerja meningkat. Menurut Rinaldi (2005), menurunnya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh beberapa faktor. Jika dilihat pada sektor *electricity* lebih banyak perusahaan menggunakan capital investment dibanding labor. Untuk *food* mungkin ada kombinasi antara capital investment dan labor. Dan mungkin untuk *estate* akan menyerap lebih banyak pekerja, sehingga memang bisa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja. Kuantitas penyerapan tenaga kerja yang diminta menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan

yang maksimum (Haryo Kuncoro, 2001). Untuk mengetahui dampak penurunan penyerapan tenaga kerja, perlu terlebih dahulu dihitung koefisien tenaga kerja per masing-masing sektor. Koefisien tenaga kerja sektoral merupakan indikator untuk melihat daya serap tenaga kerja di masing-masing sektor. Semakin tinggi koefisien tenaga kerja di suatu sektor menunjukkan semakin tinggi pula daya serap tenaga kerja di sektor yang bersangkutan, disebabkan karena semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit *output*.

4.2.1 Pengaruh UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel upah minimum kabupaten sebesar 0,423 dengan arah positif. Upah minimum kabupaten sebagai upah minimum kabupaten atau imbalan yang dapat dinilai dengan satuan yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya atas jasanya yang telah diberikan pada perusahaan, dan besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah daerah adalah baik. Dengan arti lain bahwa adanya upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan besarnya pengupahan yang wajib dan harus diberikan kepada para pekerjanya telah memberikan solusi dari permasalahan mengenai pengupahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Upah yang ditetapkan telah sesuai dengan besarnya kebutuhan dari mayoritas pekerja dan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan kinerja perusahaannya. Upah minimum kabupaten yang ditetapkan akan menjadikan perusahaan atau industri yang ada mampu dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja yang ada di wilayah guna meningkatkan dan mengembangkan suatu usaha dari perusahaan atau industri yang ada. Bila upah minimum yang ditetapkan tidak sesuai atau terlalu besar maka perusahaan atau sektor industri yang ada di Kabupaten Banyuwangi tidak akan mampu untuk melakukan penyerapan tenaga kerja yang relatif meningkat dalam setiap periodenya.

Dalam teori ekonomi klasik (Stopler-Samuelson) menunjukkan, koreksi harga relatif input (upah relatif terhadap biaya kapital) melalui leberalisasi ekonomi, akan mengarahkan alokasi faktor produksi dengan menggunakan yang berlebih dan menghasilkan nilai produksi yang akan meningkatkan tingkat upah riil. Sedangkan menurut golongan keynesian baru, upah didalam pasaran ditentukan secara kontrak diantara pekerja dan majikan atau pihak perusahaan, dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Secara teori, tidak ada pengaruh langsung antara upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Adapula perbandingan UMK penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Nenik Woyanti (2011), yang berjudul “pengaruh jumlah usaha, nilai investasi, dan upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang”, variabel UMK dalam penelitian terdahulu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.

4.2.2 Pengaruh Jumlah Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel jumlah usaha sebesar 0,459 dengan arah positif. Jumlah usaha sebagai banyaknya jumlah sektor industri atau usaha yang ada pada suatu wilayah dalam periode tertentu adalah baik, dengan artian lainnya bahwa adanya jumlah usaha atau industri yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang relatif meningkat dalam dalam setiap tahunnya, telah memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang ada. Peningkatan jumlah usaha yang ada pasti memerlukan berbagai macam aktivitas yang akan membutuhkan tambahan terhadap tenaga yang digunakan dalam proses aktivitas usaha. Dengan adanya peningkatan serta pertumbuhan jumlah usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi, tentunya akan memberikan penyerapan terhadap suatu angkatan kerja

yang ada dalam setiap periodennya. Jika angkatan kerja yang berhasil diserap relatif sesuai dengan peningkatan jumlah usaha yang ada maka secara langsung akan mengurangi pengangguran yang ada didalam suatu wilayah. Jumlah usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari berbagai macam sektor ekonomi yang terdiri dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan kerakyattan, pertumbuhan jumlah usaha di Kabupaten Banyuwangi yang berkembang dari segala sektor akan menciptakan adanya penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah angkatan kerja dalam setiap periodenya.

Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak terjadi penambahan tenaga kerja. Teori klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap-tiap faktor-faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut, atau dengan kata lain jumlah usaha menghasilkan lowongan pekerjaan yang besar (Simanjuntak, 2001). Adapula perbandingan atau persamaan jumlah usaha antara penetian sekarang dengan terdahulu yaitu menurut Nonik Woyanti (2011), yang berjudul “pengaruh jumlah usaha, nilai investasi, dan upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang”, variabel jumlah usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.

4.2.3 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel investasi sebesar 0,329 dengan arah positif. Investasi sebagai penanaman uang

(modal) di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan disuatu wilayah adalah baik, dengan artian lainnya bahwa adanya peningkatan jumlah modal atau investasi yang masuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Tentunya akan memberikan pengembangan terhadap suatu sektor usaha yang ada, harapan dari investor dalam menanamkan modalnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam menciptakan suatu keuntungan yang ada atau melebihi keuntungan dalam setiap periodenya suatu sektor industri atau usaha pasti akan mengembangkan usahanya untuk mendapatkan pangsa yang diharapkannya. Dalam hal ini, industri atau usaha yang ada dapat mengembangkan aktivitas operasi usahanya, operasi usaha atau industri yang semakin meningkat dan diperbesar tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang relatif lebih besar. Penanaman modal yang diharapkan oleh investor untuk mendapatkan suatu keuntungan telah memberikan peningkatan terhadap perkembangan suatu industri atau usaha, yang secara langsung juga akan memberikan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sektor industri atau usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam teori Neo Klasik investasi merupakan teori tentang akumulasi kapital optimal. Menurut teori ini, kapital yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa kapital relative terhadap harga output. Harga jasa kapital pada gilirannya tergantung pada harga barang-barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan. Investasi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu dengan yang lainnya. Adapula perbedaan Investasi penelitian sekarang dengan terdahulu yaitu menurut Rizky (2012), yang berjudul “pengaruh nilai investasi, nilai upah, dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai investasi

terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

4.2.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,360 dengan arah positif. Pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin APBD untuk daerah/ regional yang bertujuan menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi adalah baik. Dengan artian lainnya bahwa dengan adanya pengeluaran pemerintah dalam membangun perekonomian yang ada di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah melakukan berbagai macam kebijakan anggaran dan belanja guna memberikan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayahnya. Besarnya pengeluaran pemerintah juga akan menentukan berbagai aktivitas dan pembangunan yang ada di wilayahnya, pengeluaran yang dianggarkan dan dibelanjakan secara tepat. Tentunya akan memberikan peningkatan terhadap kinerja suatu sektor ekonomi atau usaha yang ada. Pengeluaran yang sesuai untuk mendapatkan produktivitas atau hasil suatu sektor ekonomi yang ada pasti akan membutuhkan tenaga kerja yang juga relatif lebih besar. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang berkontribusi untuk pembangunan dan peningkatan suatu sektor ekonomi akan menciptakan adanya penyerapan tenaga kerja dalam setiap periodenya. Pengeluaran pemerintah yang ada tentunya juga akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja dalam suatu sektor ekonomi di wilayahnya.

Di dalam teori Keynes tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pembelanjaan agregat. Pada umumnya pembelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai

tingkal full employment. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan full employment. Belanja modal yaitu belanja pemerintah daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja umum. Adapula keterkaitan pengeluaran pemerintah antara penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu menurut Ariyanto (2007), yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007”. Berdasarkan hasil analisis ECM (*Error Correction Model*) pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

- a. UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Banyuwangi. Hal ini membuktikan dengan adanya UMK, jumlah usaha, investasi, dan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
- b. UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya upah minimum kabupaten yang sesuai dengan kemampuan industri dan kebutuhan masyarakatnya akan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.
- c. Jumlah usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah usaha yang ada didalam suatu wilayah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- d. Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya investasi yang ada didalam suatu wilayah akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri dan usaha, perkembangan yang ada akan memberikan daya dalam memberikan penyerapan tenaga kerja.
- e. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan dan memacu sektor ekonomi didaerahnya maka akan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, makadapat disarankan sebagai berikut ;

- a. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat menyesuaikan upah minimum yang ditetapkan, sehingga upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan besarnya pengeluaran konsumsi yang dibutuhkan dan industri yang ada tetap mampu dalam mengembangkan usahanya sehingga perkembangan yang ada akan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
- b. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat lebih meningkatkan atau mengembangkan jumlah usaha yang ada, sehingga akan menciptakan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.
- c. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat lebih menarik minat investor dalam menginvestasikan dananya, sehingga investasi yang ada akan memberikan perkembangan terhadap sektor dan usaha yang ada yang akan memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.
- d. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan pengeluarannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan usaha, sehingga pertumbuhan yang ada akan memberikan penyerapan tenaga kerja yang relatif meningkat dalam setiap periodenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Roni, 2010. “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*”. Institut Pertanian Bogor.
- Arianto. 2010. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja propinsi jawa tengah tahun 1985-2007*”. Universitas Sebelas Maret.
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Pusat Statistik, 2004-2013. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Berbagai Edisi*. Banyuwangi: BPS.
- Dinsos, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi Tahun 2014.
- Disperindag dan Pertambangan, Badan Keu dan asset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.
- Dumairy, 1997: *Perekonomian Indonesia* , Penerbit Erlangga. Jakarta
- Gujarati, Domador, 2004. *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Halim. Abdul, 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Jakarta.
- Jhingan, L. M, 2000. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jumriadi, 2010. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Upah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan Periode 1999-2008*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Dipublikasikan.
- Kuncoro, H., 2001. Sistem Bagi Hasil dan Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja. *Media Ekonomi*. Volume 7, Nomor 2 hal 165-168.
- Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta

- Lipsey, G. Richard, 1995. *Economics*. Terjemahan, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Maning, Chris, 2002. *Minimum Wages: Social Policy Versus Economic, Policy*, Nuning Ahmadi (ed), Semeru News: No.1 Januari-Maret 2000.
- Mankiw, N. Grogory, 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
- Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian, Bogor*, Ghalia Indonesia, Tahun 1998.
- Mudrajad Kuncoro, 2004. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Nuryanti, Veronika, 2003, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Subsektor Industri kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas, Skripsi, UNDIP, Semarang.
- Nordiawan, Deddi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2003. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Edisi Kesembilan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Pratama, Nelsen Diyan. 2012. “*Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Kab. Jepara*”. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. MediaKom, Yogyakarta
- Putra, Rizky Eka. 2012. “*Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Podurungan Kota Semarang*”. Universitas Negeri Semarang.
- Rinaldi, 2005. *Analisis Permintaan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Sumatera Utara*. Tesis. Tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Ritonga, J. Tafbu, 2005. *Mencermati Delema Upah Minimum*, WASPADA Online.

- Sarwono, J. (2013). *Mengenal SPSS Statistics 20: Aplikasi untuk Riset Eksperimental*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. Kompas Gramedia.
- Simanjuntak, Panyaman, 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sumarsono, Sony, 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukirno, Sadono, 1999, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Cetakan ke 11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Pengantar Mikroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. ANDI. Jakarta.
- Tadaro, M., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2004. *Upah, Jaminan Sosial dan Perlindungan Anak*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Wahyu, Tri. 2004. “Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil dalam Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Dinamika Pembangunan*.
- Woyanti, Nenik dan Ayu Wafi Lestari. 2011. “Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang”. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Zamrowi, M.Taufik, 2007. “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil”. Universitas Diponegoro. Semarang.

LAMPIRAN 1. REKAPITULASI DATA SEKUNDER PENELITIAN

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	UMK	JUMLAH USAHA	NILAI INVESTASI (miliar rupiah)	Pengeluaran Pemerintah (miliar rupiah)
2004	46.843	372.000	10.810	140,80	544,39
2005	46.930	372.000	11.000	143,20	677,21
2006	47.138	483.300	11.200	144,00	815,82
2007	48.838	567.000	11.265	149,00	869,42
2008	49.128	619.000	11.326	150,30	951,27
2009	49.132	744.000	11.377	151,80	1.105,49
2010	72.488	824.000	15.076	153,40	1.219,98
2011	75.436	865.000	15.808	154,90	1.443,02
2012	53.273	915.000	16.798	494,40	1.683,01
2013	58.237	1.086.000	17.610	686,04	1.933,42

LAMPIRAN 2. HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

DESCRIPTIVES VARIABLES=X.1 X.2 X.3 X.4 Y

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UMK	10	372000	1086400	6.85E5	241321.436
Jumlah Usaha	10	10810	17610	1.32E4	2745.481
Investasi	10	14080	68604	2.37E4	19172.967
Pengeluaran Pemerintah	10	54439	193342	1.12E5	44773.146
Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi	10	46843	75436	5.47E4	10732.214
Valid N (listwise)	10				

REGRESSION

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT Y
 /METHOD=ENTER X.1 X.2 X.3 X.4
 /SCATTERPLOT=(*SRESID , *ZPRED)

 /RESIDUALS DURBIN NORM(ZRESID).

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi	5.47E4	10732.214	10
UMK	6.85E5	241321.436	10
Jumlah Usaha	1.32E4	2745.481	10
Investasi	2.37E4	19172.967	10
Pengeluaran Pemerintah	1.12E5	44773.146	10

Correlations

		Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi	UMK	Jumlah Usaha	Investasi	Pengeluaran Pemerintah
Pearson Correlation	Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi	1	.111	-.112	.437	-.513
	UMK	.111	1	-.000	-.726	-.975
	Jumlah Usaha	-.112	-.000	1	-.770	-.947
	Investasi	.437	-.726	-.770	1	-.028
	Pengeluaran Pemerintah	-.513	-.975	-.947	-.028	1
Sig. (1-tailed)	Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi		.028	.115	.043	.036
	UMK	.028		.000	.009	.000
	Jumlah Usaha	.115	.000		.005	.000
	Investasi	.043	.009	.005		.000
	Pengeluaran Pemerintah	.036	.000	.000	.002	
N	Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi	10	10	10	10	10
	UMK	10	10	10	10	10
	Jumlah Usaha	10	10	10	10	10
	Investasi	10	10	10	10	10
	Pengeluaran Pemerintah	10	10	10	10	10

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Usaha, UMK ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.904 ^a	.817	.783	3250.267	1.531

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Usaha, UMK

b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.838E8	4	2.460E8	5.588	.042 ^a
	Residual	5.282E7	5	1.056E7		
	Total	1.037E9	9			

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Usaha, UMK

b. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.27E+271	5.71E+271		-1.474	.217		
	UMK	.221	.168	.423	1.123	.311	.423	5.993
	Jumlah Usaha	4.00	.127	.459	4.120	.004	.510	1.936
	Investasi	340	.213	.527	5.151	.002	.527	7.437
	Pengeluaran Pemerintah	375	.205	.553	5.270	.015	.553	8.321

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi

Collinearity Diagnostics^a

Model	Df	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	UMK	Jumlah Usaha	Investasi	Pengeluaran Pemerintah
1	1	4.72E	1.000	.70	.00	.00	.00	.70
	2	.22E	4.545	.29	.00	.00	.19	.70
	3	.041	10.737	.11	.02	.00	.27	.21
	4	.001	31.830	.03	.17	.65	.07	.10
	5	.001	68.419	.07	.60	.35	.47	.19

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi

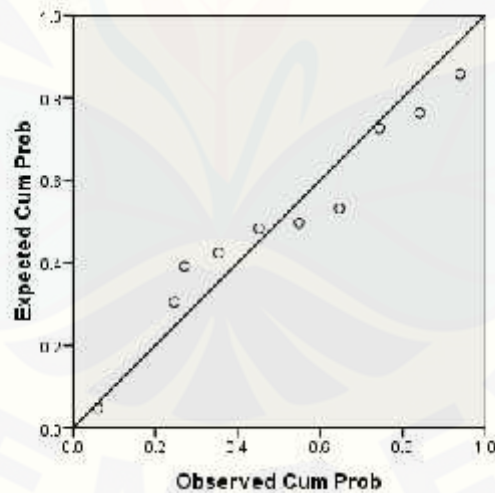
Residuals Statistics^a

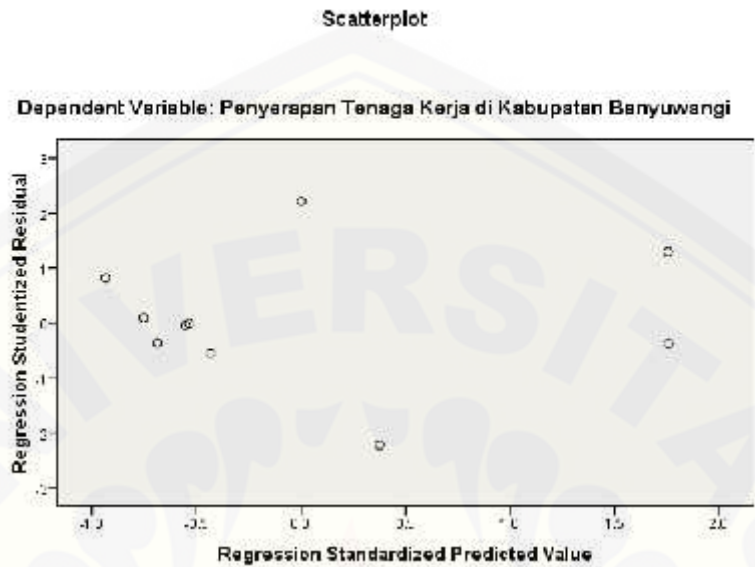
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	44977.26	73115.06	5.47E4	10455.209	10
Std. Predicted Value	-.904	1.757	.000	1.000	10
Standard Error of Predicted Value	1367.138	2846.211	2.240E3	542.121	10
Adjusted Predicted Value	43286.67	74827.10	5.38E4	10876.233	10
Residual	-5.411E3	3477.619	.000	2422.606	10
Std. Residual	-1.665	1.070	.000	.745	10
Stud. Residual	-2.218	2.216	.087	1.187	10
Deleted Residual	-9.609E3	1.491E4	955.845	6616.855	10
Stud. Deleted Residual	-15.830	14.737	-.002	7.233	10
Mahal. Distance	.692	6.001	3.600	1.967	10
Cook's Distance	.000	3.229	.508	1.002	10
Centered Leverage Value	.077	.667	.400	.219	10

a. Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi





NPARTESTS
 /K-S(NORMAL)=X.1 X.2 X.3 X.4 Y
 /MISSING ANALYSIS.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		UMK	Omah Usaha	Investasi	Pengeluaran Pemerintah	Penyediaan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi	
N		10	10	10	10	10	
Normal Parameters ^a		Mean	8.55E5	13227.00	2.37E4	112430.33	51741.30
		Std. Deviation	2.41E5	2748.481	1.917E4	44773.143	10752.214
Most Extreme Differences		Absolute	.113	.260	.465	.151	.299
		Positive	.107	.150	.465	.151	.299
		Negative	-.113	-.189	-.308	-.093	-.291
Lilliefors Significance Z			.373	1.106	1.172	.773	.917
Asymp. Sig. (2-tailed)			.991	.173	.076	.977	.331

a. Test distribution = Normal

NPAR TESTS
 /K-S(NORMAL)=PRE_1
 /MISSING ANALYSIS.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	5.4744300E4
	Std. Deviation	1.04552092E4
Most Extreme Differences	Absolute	.267
	Positive	.267
	Negative	-.175
Kolmogorov-Smirnov Z		.844
Asymp. Sig. (2-tailed)		.474

a. Test distribution is Normal.

LAMPIRAN 4. TABEL F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0.05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	190	216	225	230	234	237	238	241	242	243	244	245	246	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.20	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.39	6.25	6.28	6.16	6.09	6.04	6.00	5.98	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.15	5.05	4.95	4.86	4.82	4.77	4.74	4.70	4.66	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.52	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.58	4.71	4.33	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.87	3.62	3.46	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.45	3.30	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.96	3.57	3.31	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.87	3.48	3.22	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.15	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.28	3.05	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.46	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.92	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.25
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.77	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.75	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.48	2.37	2.28	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.98	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.47	2.36	2.27	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.97	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.25	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.94	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.60	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.59	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.91	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

LAMPIRAN 3. TABEL t

Titik Persentase Distribusi t ($df = 1 - 40$)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70520	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76480	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44891	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30800	2.89848	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38300	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69901	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16057	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34500	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60240	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32310	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44866	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34783
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33282
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32583
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71158	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70445	3.30688